

***IMPLEMENTATION OF COOPERATION RELATIONS BETWEEN INDONESIA  
AND AUSTRALIA IN THE SOUTH CHINA SEA SECURITY CONFLICT 2019–2023***

**Oleh : Shaliq Khaliq Ghalib**  
**Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP, MA**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The research aims to explain how the implementation of bilateral cooperation relations between Indonesia and Australia in Facing South China Sea Security Conflicts in 2019-2023. The conflict occurs due to the emergence of China as with its aggressive foreign policy in an effort to dominate the Indo-Pacific Region, especially the South China Sea. The People's Republic of China's hegemony in the South China Sea constitute a geopolitical threat and disrupt stability in the South China Sea.*

*This research uses a descriptive qualitative approach based on literature studies that uses several data collection methods in the form of documents, journals, research reports, archives, and electronic media derived from the official website based on formal and informal forms. This research uses the perspective of neorealism, Theory of cooperation, and the level of national analysis.*

*The results show that the implementation of Indonesia's Defense and Security Cooperation with Australia is increasing with the signing of the new Defence Cooperation Agreement to be more comprehensive at the seventh 2+2 Meetings on September 9 2021. The Indonesian government overcomes China's presence in the South China Sea Region by presenting external parties, such as Australia as a balancing party in the region, aimed at countering the People's Republic of China dominance in the South China Sea.*

***Keywords: Bilateral Relations, South China Sea, People's Republic of China, Indonesia, Australia***

**PENDAHULUAN**

Dinamika hubungan internasional mendorong hubungan ketergantungan antar negara. Perilaku saling ketergantungan ini, didasari oleh kepentingan masing-masing

negara, untuk menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi di sekitar kawasan. Pengembangan hubungan antar negara ini, tetap berpedoman atau mengacu kepada kepentingan nasional masing-masing

negara. Dalam Buku Putih Kementerian Pertahanan Indonesia<sup>1</sup> tahun 2015 menjelaskan, perkembangan lingkungan strategis di kawasan, turut mempengaruhi proses penyelenggaraan pertahanan negara. Politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dan mengedepankan prinsip cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan, menjadikan Indonesia berpandangan bahwa, negara tetangga merupakan sahabat sekaligus mitra strategis, guna menciptakan stabilitas di kawasan.<sup>2</sup>

Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan yang bersifat bilateral antar negara, adalah untuk membangun kemitraan yang harmonis dan kuat dengan lingkungan eksternalnya, serta menciptakan hubungan persahabatan. Muara utama dari semua hubungan bilateral tersebut diatas, tentunya adalah upaya pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Secara lebih spesifik, beberapa konsep utama dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Kerjasama antar negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya, baik dalam bentuk ekonomi, politik, budaya termasuk pertahanan keamanan.

Isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, telah menjadi isu penting dan strategis bagi kelangsungan hidup suatu

negara dalam dunia internasional. Keamanan sendiri, pada dasarnya adalah suatu tujuan dari kepentingan nasional suatu bangsa, dan menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan atas harga diri bangsa tersebut. Peningkatan pertahanan dan keamanan, didorong dengan pembaruan alutsista dan pemberdayaan sumber daya manusia yang kompatibel. Kedua hal inilah, yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia, untuk melakukan Kerjasama dengan negara lain, baik berbentuk Kerjasama bilateral, maupun multilateral. Kerjasama yang diupayakan tersebut, bertujuan untuk memastikan pencapaian kepentingan nasional.

Kementerian Pertahanan Indonesia dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia perlu melakukan kerjasama pertahanan dengan beberapa Negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Malaysia, dalam bentuk meningkatkan kapabilitas pertahanan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.<sup>3</sup> Demi mencegah terjadinya konflik dan mewujudkan keinginan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional diperlukannya pengembangan terhadap Alutsista dan kualitas dari Sumber Daya Manusia melalui kerjasama dengan Negara lain baik itu Kerjasama Bilateral ataupun Multilateral.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari Kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara paling stabil kondisi geopolitiknya. Hal ini, disebabkan oleh karena minimnya potensi konflik yang terjadi di Laut China Selatan.

---

<sup>3</sup> Ibid hlm 72-89

<sup>4</sup> Marthin Manurung, *Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Dengan Jepang Tahun 2015-2020*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021), h. 17

---

<sup>1</sup> Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI. hlm 1

<sup>2</sup> Ibid hlm 2

Namun, stabilitas tersebut mulai goyah, pasa perluasan hegemoni Tiongkok di Laut China Selatan. Sejak tahun 2012, Pemerintah Tiongkok melakukan klaim sepihak atas Laut China Selatan, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut masuk dalam kedaulatan negaranya. Klaim sepihak ini, berimplikasi kepada argumentasi Pemerintah Tiongkok, bahwa negaranya berhak melakukan apapun di Laut China Selatan.<sup>5</sup> Hegemoni tersebut, kemudian dibuktikan dengan reklamasi dan pembangunan infrastruktur di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel.<sup>6</sup> Reklamasi seluas 3.200 hektar ini, ditunjang dengan fasilitas militer lengkap, yang dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara di sekitar Laut China Selatan.

Jika melihat perkembangan sebelumnya, Tiongkok lebih cenderung melakukan diplomasi dan kebijakan defensive dalam mempertahankan posisinya dikawasan. Namun kemudian, Tiongkok mulai menampakkan agresivitasnya dalam merebut dan mempertahankan klaimnya dikawasan. Hal ini didukung dengan mundurnya Amerika Serikat dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang merupakan perjanjian kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Mundurnya Amerika Serikat ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Tiongkok sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan militernya dalam menghadapi Amerika Serikat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Eleanor Freund, *Freedom of Navigation in the South China Sea: A Practical Guide*, (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs, 2017), h. 4

<sup>6</sup> Prayoga, Adhit. dkk. 2021. *Diplomasi Pertahanan Di Laut Cina Selatan: Solusi Strategis*. Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 7 No. 2 hlm 71

<sup>7</sup> Bambang Cipto, *Strategi China Merebut Status Super Power*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar, 2018), h. 146

Tentunya permasalahan ini dapat mengakibatkan gesekan yang fatal terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan dikawasan tersebut. *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Laut China Selatan nyatanya menjadi sebuah pemicu agresivitas Tiongkok di kawasan tersebut dan merespon operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Pada tanggal 26 november 2013 China menerjukan 1 kapal Induk, 2 kapal perusak, dan dua fregat misil ke wilayah jalur laut china selatan<sup>8</sup>

Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa aktivitas militer tersebut hanyalah aktivitas rutin untuk meningkatkan kemampuan militer, penelitian ilmiah, pengetesan teknis dan bukanlah bentuk ancaman. Namun, menurut Amerika Serikat, bahwa aktivitas Tiongkok tersebut menimbulkan masalah serius yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan Council of Foreign Relations yang merupakan lembaga think tank Amerika Serikat yang meneliti kebijakan luar negeri negara tersebut mengungkapkan jika konflik di Laut China Selatan meluas menjadi perang konvensional maka perdagangan internasional akan merugi sekitar 5 triliun USD tiap tahunnya.<sup>9</sup>

Hal ini kemudian membuat Amerika Serikat mempertimbangkan untuk melakukan peningkatan operasi di kawasan sengketa serta mendorong agar sekutu-

---

<sup>8</sup> Carl Thayer, "USS Cowpens Incident Reveals Strategic Mistrust Between U.S. and China", diakses dari The Diplomat di <https://thediplomat.com/2013/12/uss-cowpens-incident-reveals-strategic-mistrust-between-u-s-and-china/> Senin, 20 Maret 2023, pukul 12:08 am.

<sup>9</sup> Bonnie S Glaser, "Conflict in the South China Sea", diakses dari <https://www.cfr.org/report/conflict-south-china-sea>, Rabu 22 Maret 2023, pukul 08.24 am

sekutunya untuk melakukan 4 ndust dan pengawasan terhadap militer Tiongkok yang sulit untuk dikendalikan jika hanya menggunakan langkah-langkah diplomatis. Pada tahun 2015 telah hadir 1.150 dari 2.500 Marinir Amerika di bandara Darwin yang akan berlangsung hingga 2020. Penempatan ini, merupakan program jangka Panjang Amerika dan Australia atas kebijakan presiden Barack Obama yaitu “pivot towards Asia”.<sup>10</sup> Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia adalah merupakan sebuah bentuk respon dalam mempersiapkan diri menghadapi adanya ancaman. Bukan hanya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang melakukan peningkatan kekuatan militernya, Indonesia juga ikut melakukan hal yang sama. Bahkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sedang giat-giatnya meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanannya.

Hal ini dapat diketahui dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019 sebagaimana yang pernah dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, sehingga terdapat sasaran utama kebijakan politik luar negeri Indonesia yang cenderung terfokus kepada permasalahan maritim, keamanan, pertahanan, dan kedaulatan negara. Sasaran-sasaran tersebut meliputi: (1) pewujudan Indonesia sebagai negara maritime dengan penguatan diplomasi maritim, (2) penyelesaian perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga, menjamin integritas suatu wilayah, kedaulatan maritim dan keamanan, serta mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan (3)

---

<sup>10</sup> Tom Westbrook, “U.S. and Australia to share cost of Marines deployed in Darwin”, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-australia-usa-defence-idUSKCN126067>, rabu 22 Maret 2023, pukul 08.45am

meningkatkan peran serta kontribusi dalam mendorong penyelesaian sengketa teritori di berbagai Kawasan . Dalam hal ini, Indonesia telah mengupayakan pertahanan dan keamanan dalam mendukung pencapaian kepentingan Nasional, dan ada banyak Negara yang telah menjadi mitra pertahanan Indonesia diantaranya adalah Australia, kerjasama antara Indonesia dan Australia sudah memiliki akar sejarah yang Panjang yaitu sejak akhir era 1950-an dimana Indonesia mengirim beberapa Perwira militer untuk menjalani pelatihan khusus di Australia.<sup>11</sup>

Namun, jika diperhatikan bahwa hubungan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Australia mengalami naik turun. Salah satu peristiwa yang membuat menurun signifikan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia adalah bocornya skandal penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat pada waktu itu.<sup>12</sup> Indonesia mengambil sikap dengan menarik duta besar dari negara tersebut dan mengirmkan nota protes. Meskipun hubungan menurun pada waktu itu Indonesia tetap menjalin hubungan dengan Australia mengingat negara tersebut merupakan salah satu negara *non-claimant state* dan merupakan salah satu lokasi pangkalan militer Amerika Serikat dan juga memiliki kepentingan geopolitik dalam hal kebebasan pelayaran dan kebebasan

---

<sup>11</sup> Evan a Laksmana, *Reinforcing Indonesia-Australia Defence Relation: the case of maritime calibration* (Sydney: Lowy Institute, 2018) hal 11

<sup>12</sup> Esthi Maharani, ”Soal Penyadapan, Istana: Australia Perlu Klarifikasi ke Indonesia”, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/18/mwg3hf-soal-penyadapan-istana-australia-perlu-klarifikasi-ke-indonesia?>, hari rabu 22 Maret pukul 10.45am

perniagaan di sekitar Laut China Selatan.<sup>13</sup> Australia memandang Indonesia sebagai mitra strategis karena Indonesia merupakan kekuatan utama politik regional dalam wadah ASEAN dan dunia, memegang teguh pada prinsip non-blok, juga menjadi pusat penghubung utama bagi perniagaan laut Australia.

Oleh karenanya, peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara sangat perlu dilakukan. Sebab masalah keamanan, pertahanan dan keselamatan negara serta warga negara merupakan sebuah kepentingan Nasional yang menjadi pertimbangan. Hal tersebutlah kemudian yang mendorong sebuah Negara melalui kebijakan Politik Luar Negerinya untuk kemudian menjalin kerjasama. Komitmen bersama dalam hal peningkatan kerja sama serta Kemitraan Komprehensif, kemudian disepakati dalam sebuah *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia 2005 (Lombok treaty)* yang meliputi kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, keamanan, program pertukaran pelajar dan budaya, penyelundupan manusia, dan program humanitarian dimana Australia memberikan 1 miliar dollar melalui *Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction dan Development (AIPRD)* untuk pemulihan ekonomi Provinsi Aceh yang terkena bencana tsunami pada waktu itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhar Junef, Jurnal, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan", (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), hal 228

<sup>14</sup> Australia Government :Department of Foreign Affairs and Trade, *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia*, diakses dari <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of->

Kemudian juga ada *Agreement Between the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation 2006* yang merupakan sebuah perjanjian untuk memperkuat kerjasama bilateral yang telah ada untuk memerangi terorisme dan bentuk lain dari kejahatan transnasional dan ancaman keamanan non-tradisional seperti misalnya penyelundupan dan perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, keamanan penerbangan dan keamanan maritim, dan flu burung, manajemen bencana alam, dan illegal fishing.<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan kondisi Politik Internasional yang semakin dinamis, maka kerjasama antara Indonesia dengan Australia kemudian semakin terus berkembang. Bahkan terhitung sejak tahun 2011 telah dikembangkan mekanisme baru dalam memperkuat kerjasama diantara kedua negara yang di sebut sebagai *Annual Leaders Meeting (ALM)* sebuah forum tertinggi dalam kerja sama antara kedua negara ini, dimana kedua pemimpin yaitu Presiden Republik Indonesia dipertemukan dengan Perdana Menteri Australia untuk memberikan arahan terkait penguatan Kerjasama yang sudah terjalin diantara kedua negara. Selain dalam forum ALM, pemimpin tertinggi kedua negara juga bertemu secara berkala dalam berbagai kesempatan untuk kemudian membicarakan isu yang kemudian menjadi perhatian bagi kedua negara.<sup>16</sup>

---

indonesia, rabu 22 Maret 2023 pukul 09.40 pm

<sup>15</sup> National Interest Analysis, *Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia the Framework for Security Cooperation*, diakses dari <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/other/dfat/ATNIA/2006/43.html>, Kamis 23 Maret pukul 11.05 am

<sup>16</sup> Jullia Gillard, 1st Indonesia-Australia Annual Leaders' Meeting - Joint Communique, (Australia Government

Terdapat juga *Foreign Defence Ministers Meeting (2+2 Dialogue)* yang merupakan sebuah forum pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia yang berfungsi bagi kedua negara sebagai sebuah wadah untuk membahas isu-isu strategis, baik itu terkait Hubungan Bilateral pada kedua Negara maupun perkembangan Regional dan Global. Isu-isu tersebut meliputi keamanan dan pertahanan, Stabilitas Kawasan, Penanganan Terorisme, dan lainnya. Terakhir, ada *Indonesia-Australia Dialogue (IAD)* yang merupakan sebuah pertemuan antar pemerintah, namun juga terdapat forum IAD bagi kalangan non-pemerintah seperti anggota Parlemen, Akademisi, Jurnalis, Wira usahawan, Pebisnis, Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lain sebagainya. Tujuan dari pengembangan forum ini kemudian didasarkan atas kesadaran untuk memperkuat hubungan antar-masyarakat atau *people-to-people links* yang merupakan pilar utama dalam hubungan kedua negara.

Bagi Indonesia, Australia merupakan Mitra Strategis dikawasan Indo-Pasifik dalam kerjasama Pertahanan, dimana Kerjasama tersebut telah memberikan kontribusi bagi pembangunan kemampuan pertahanan Indonesia. Kerja sama pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia dengan Australia kemudian menimbulkan suatu keadaan yang dikenal sebagai *security dilemma* karena Tiongkok juga merupakan mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan Indonesia.

---

:Department of Prime Minister and Cabinet), diakses dari <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-18287>, Kamis 23 Maret.

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti sampaikan, peneliti akan membahas lebih lanjut ***bagaimana implementasi hubungan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia, dalam menghadapi konflik keamanan Laut China Selatan tahun 2019-2023.***

## **KERANGKA TEORI**

### **Paradigma Neo-Realisme**

Neo-Realisme merupakan salah satu pendekatan atau paradigma dalam Ilmu Hubungan Internasional yang dikembangkan pertama kali oleh Kenneth Waltz. Neo-Realisme muncul dengan dasar-dasar paradigma realisme klasik, sehingga acapkali paradigma Neo-Realisme juga disebut dengan “realisme struktural”.<sup>17</sup> Realisme mempelajari perilaku manusia dalam membentuk hubungan antar-negara dan bahwa sejatinya, manusia dilahirkan dengan naluri alamiah yang jahat, mementingkan diri sendiri, serakah, dan senantiasa berkompetisi dengan sesama makhluk hidup lainnya. Berdasarkan teori ini, manusia akan berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun akan menyebabkan kematian di kedua sisi.<sup>18</sup>

Dalam Neo-Realisme, negara dan aktor lainnya, saling berinteraksi dalam sebuah sistem internasional yang anarkis. Negara dan aktor yang berinteraksi ini, akan saling berusaha untuk memaksimalkan sumberdaya yang mereka miliki, guna mencapai kepentingan nasionalnya.

---

<sup>17</sup> Puji Andrianto. 2018. “*Pandangan Neo-Realisme Terhadap MERCOSUR Sebagai Institusi Perdagangan di Kawasan Amerika Selatan.*” eJournal Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNMUL Vol. 6 No. 2 hlm 731-744

<sup>18</sup> Hamka Hendra Noer. 2022. “*Perang dan Keamanan dalam Tinjauan Teori Neo-Realisme dan Institusionalisme*”. Jurnal Independen Vol. 3 No. 1 hlm 25-36

Kepentingan nasional ini, juga dikenal dengan sebagai kepentingan nasional yang bertujuan atau berorientasi kepada peningkatan kekuatan suatu negara.<sup>19</sup> Kekuatan kemudian didefinisikan sebagai kemampuan material, yaitu kemampuan militer, ekonomi, sosial, dan politik. Neo-Realisme menganggap bahwa perang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.<sup>20</sup> Waltz juga menjelaskan lebih jauh, bahwa struktur internasional itu sendiri, menjadi penyebab dari perang yang terjadi. Struktur internasional yang anarki, menjadikan negara-negara dalam dunia internasional, melakukan pengembangan Angkatan Bersenjata-nya untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Neo-Realisme pada dasarnya, tidak mempercayai bahwa negara dapat bekerjasama satu sama lain dengan tulus.<sup>21</sup> Jikapun antar-negara saling bekerjasama, pada dasarnya mereka lebih fokus kepada besaran keuntungan yang akan didapatkan dari pihak lain. Mereka khawatir jika suatu negara mendapatkan keuntungan lebih banyak, itu akan digunakan untuk memperkuat kemampuannya militernya. Sehingga yang pada awalnya antar-negara tersebut adalah kawan, akan berbalik menjadi lawan dikemudian hari.

### **Teori Kerjasama**

Kerjasama memiliki beberapa bentuk dalam pelaksanaannya, seperti keamanan dan pertahanan, ekonomi, politik, budaya, dan social, Kerjasama Internasional, muncul karena desakan keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki tidak

sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan dan potensi yang dimiliki negara lain Kerjasama Internasional sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu aturan agar berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Pada dasarnya dapat dimaklumi bahwa semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri dengan sendirinya termasuk dalam hal memenuhi untuk kebutuhannya sendiri, terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negerinya. Setiap negara pasti akan membutuhkan kerja sama dengan negara lain karena adanya kondisi saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi Hubungan Internasional yang ditandai oleh adanya Hubungan Kerjasama Internasional dan berkembangnya berbagai aspek yang menjadi objek kerangka yang akan dikerjasamakan yang berkaitan dengan masalah-masalah kejahatan transnasional. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia dan Australia.

Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah Nasional, Regional atau Global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul dalam penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan sesuatu permasalahan, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.<sup>22</sup>

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, bahwa hubungan kerjasama adalah

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

---

<sup>22</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 652

serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Aktor-aktor negara yang terlibat dalam hal membangun hubungan kerjasama melalui suatu Organisasi Internasional maupun kerjasama Internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat dari aturan-aturan yang disetujui, norma-norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan dan kepentingan negara bertemu dalam Lingkup Hubungan Internasional.<sup>23</sup>

### **Tingkat Analisa Negara Bangsa**

Penelitian ini menggunakan Teori David Singer. Menurut Singer, dalam tingkat analisa bangsa, negara dianggap sebagai unit utama dalam sistem internasional. Dalam memahami tindakan suatu negara dalam hubungan internasional, Singer mengatakan bahwa faktor-faktor domestik seperti struktur politik, kekuatan ekonomi, nilai-nilai politik, dan institusi politik di negara tersebut harus diperhatikan. Singer berpendapat bahwa faktor-faktor ini akan memengaruhi keputusan dan kebijakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Pendekatan tingkat analisa bangsa menekankan bahwa tindakan politik suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internasional, seperti kekuatan militer atau tekanan dari negara lain, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang ada di negara tersebut. Misalnya, kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok politik dalam negeri, kepentingan ekonomi nasional, atau nilai-nilai politik yang dianut oleh negara tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan tingkat analisa bangsa, analisis politik dapat memahami lebih dalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan politik suatu negara. Ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara mengambil tindakan tertentu dalam hubungan internasional dan bagaimana kekuatan politik di dalam negara tersebut berperan dalam proses pembuatan keputusan politik.<sup>24</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **GAMBARAN UMUM KONFLIK UPAYA DOMINASI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CHINA SELATAN**

#### **Gambaran Umum Konflik Di Wilayah Laut China Selatan**

Gambaran umum konflik di Laut China Selatan saat ini adalah kompleks dan melibatkan beberapa negara di wilayah tersebut. Konflik ini berpusat pada sengketa wilayah yang melibatkan klaim atas pulau-pulau dan struktur maritim di Laut China Selatan oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Tiongkok, sebagai negara dengan klaim terluas di Laut China Selatan, telah melakukan langkah-langkah yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Mereka telah melakukan reklamasi pulau dan pembangunan infrastruktur militer di beberapa pulau yang diklaimnya, seperti Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.

Hal ini telah menuai kecaman dan protes dari negara-negara lain yang juga memiliki klaim wilayah di Laut China

---

<sup>23</sup> Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theoris*. (New York : Happer and Row Publisher, 1997), h. 418

---

<sup>24</sup> J.David Singer, *World Politics*, vol 14, *The International System: Technical Essays*. (October, 1961). hal.77-92

Selatan. Selain itu, peningkatan aktivitas militer juga menjadi sumber ketegangan. Tiongkok secara teratur melakukan patroli maritim dan udara di wilayah tersebut, yang sering kali dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara tetangga. Hal ini juga memicu kehadiran kapal perang dari Amerika Serikat dan negara-negara lain yang ingin menjaga kebebasan berlayar dan mengamankan jalur pelayaran internasional di Laut China Selatan.

### **Upaya Dominasi Tiongkok di Laut China Selatan**

Upaya dominasi Tiongkok di Laut China Selatan melalui konsep Nine-Dash Line, Inisiatif Jalur dan Jalur Sutera (Belt and Road Initiative), dan ekspansi militer telah menjadi perhatian global. Konflik di Laut China Selatan melibatkan klaim yang saling tumpang tindih antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya terkait hak suverenitas, sumber daya alam, dan jalur perdagangan strategis. Konsep Nine-Dash Line adalah klaim maritim Tiongkok yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan. Tiongkok berargumen bahwa wilayah tersebut merupakan bagian integral dari kedaulatan Tiongkok berdasarkan klaim sejarah. Namun, klaim ini telah ditolak oleh beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia yang juga memiliki klaim atas wilayah yang sama.

Kemudian Inisiatif Jalur dan Jalur Sutera (Belt and Road Initiative) merupakan proyek ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur dan perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di sekitar Laut China Selatan. Melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, Tiongkok berusaha memperkuat pengaruhnya dan memperluas jaringan perdagangan yang

menguntungkan. Selain itu, Tiongkok juga melakukan ekspansi militer di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di wilayah yang disengketakan. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga yang merasa terancam oleh peningkatan kehadiran militer Tiongkok dan potensi pelanggaran terhadap kebebasan berlayar di wilayah tersebut. Upaya dominasi Tiongkok ini telah menimbulkan ketegangan dan sengketa di Laut China Selatan serta memicu keprihatinan internasional terkait stabilitas regional dan kebebasan navigasi. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN, telah mengadvokasi kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga keamanan maritim. Situasi di Laut China Selatan tetap menjadi isu yang kompleks dan penuh tantangan. Upaya diplomasi dan dialog yang terus berlanjut diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak dan menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan tersebut.

### **Nine Dash Line Sebagai Wujud Kepentingan Tiongkok di Laut China Selatan**

Nine Dash Line (garis sembilan titik) adalah konsep yang digunakan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Pada tahun 1947, pemerintah RRT menerbitkan peta yang menunjukkan garis putus-putus yang melingkari sebagian besar wilayah Laut China Selatan, mengklaimnya sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok. Dasar hukum yang menjadi landasan klaim ini adalah

sejarah kuno, termasuk klaim Tiongkok atas pulau-pulau tersebut sejak zaman dinasti-dinasti kuno. Pada saat itu, negara-negara tetangga tidak memiliki keberatan serius terhadap klaim ini.

Konflik Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan negara-negara di sekitar Kawasan Laut China Selatan, bermula dari ambisi Republik Rakyat Tiongkok untuk menciptakan hegemoni di wilayah Asia-Pasifik pada beberapa bidang, seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Ambisi Republik Rakyat Tiongkok, diawali dengan penggambaran *nine dash line* atau garis putus-putus yang dianggap sebagai wilayah Republik Rakyat Tiongkok, karena faktor sejarah.<sup>25</sup> Penguasaan Laut China Selatan, dianggap membangkitkan kebanggaan dan sentiment nasionalisme bagi rakyat Tiongkok. Tiongkok menganggap bahwa, penggunaan *nine dash line* menjadi faktor penting kedaulatan dan integritas Tiongkok.

Namun, seiring dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, klaim tersebut telah menghadapi penolakan dari negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang juga mengklaim sebagian wilayah yang sama. Mereka berpendapat bahwa klaim Tiongkok melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Klaim Nine Dash Line telah menjadi sumber perselisihan dan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara di kawasan tersebut. Sengketa wilayah di Laut China Selatan terus menjadi isu yang kompleks

---

<sup>25</sup> Thesalonika Yulyanti R, strategy of indonesia maritime defense in the middle of asia pacific conflict potential (Jurnal Strategi Pertahanan Laut) Volume 8, Nomor 1, 2022, hal 31

dan rumit dalam hubungan regional, dengan upaya-upaya diplomasi dan arbitrase internasional yang dilakukan untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai.

### **Belt and Road Initiative Republik Rakyat Tiongkok**

Selain melakukan penggambaran *nine dash line*, Pemerintah Tiongkok juga membentuk inisiasi lain dalam upaya mendominasi Asia. Inovasi yang dimaksud ialah, *Belt and Road Initiative* (BRI). Inisiasi ini merupakan wujud program kebijakan dan investasi jangka lintas benua yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan integrasi ekonomi negara-negara di sepanjang jalur *silk-road* yang bersejarah. Inisiatif ini diresmikan pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping dan hingga tahun 2016, dikenal sebagai OBOR – One Belt One Road. Pada tanggal 28 Maret 2015, garis besar dari Belt and Road Initiative telah dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan Kementerian Perdagangan (MOFCOM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan otorisasi Dewan Negara (Belt and Road Initiative, 2021). Strategi pengembangan Belt and Road Initiative (BRI) Republik Rakyat Tiongkok bertujuan untuk membangun konektivitas dan pembangunan di enam koridor ekonomi utama yang meliputi Cina, Mongolia, Rusia, negara-negara Eurasia, Asia Tengah dan Barat, Pakistan, negara lain di anak benua India, dan Kawasan Asia Tenggara.

Pengembangan BRI ini mengedepankan konektivitas, keterbukaan, motivasi pembangunan berkelanjutan, motivasi keamanan pangan dan energi, dan pembangunan regional yang seimbang (OECD, 2018). Dengan melihat peta penetapan BRI ini kemudian secara tidak

langsung memperlihatkan usaha Republik Rakyat Tiongkok untuk mendominasi dunia terutama Kawasan Asia Pasifik. Dengan melihat ambisi besar Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat selaku negara yang paling berpengaruh di dunia tentunya merespon karena dengan adanya inisiatif ini tentunya mengaburkan pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, pemerintah China telah teguh menjunjung tinggi kedaulatan dan hak serta kepentingan maritim China di Laut Cina Selatan. Serangkaian hukum, seperti Deklarasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tahun 1958 tentang Laut Teritorial China, Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tahun 1992 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tahun 1998 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dan Keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok tahun 1996 tentang Ratifikasi UNCLOS, telah lebih jauh menegaskan kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim Tiongkok di Laut China Selatan.

Sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok dalam menentukan batas wilayahnya, dengan menggunakan sumberdaya alam seperti pulau kecil, terumbu karang, dan bebatuan serta klaim atas 4 kepulauan, yaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Kepulauan Zhongsa, dan Kepulauan Spratly yang didasarkan pada posisi geografisnya yang membentuk jalur vital perdagangan dan transportasi maritim untuk Asia Timur dan Asia Tenggara serta dapat memudahkan ekspansi pasar ke Afrika. Mengutip data milik *The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyatakan bahwa 80% perdagangan global menggunakan jalur laut dan sepertiga pelayaran dunia melalui Laut China Selatan. UNCTAD memperkirakan

nilai perdagangan Tiongkok melalui Laut China Selatan, mencapai \$874 Miliar per tahunnya.<sup>26</sup>

### **Ekspansi Militer Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan**

Perluasan hegemoni Tiongkok di Laut China Selatan demi kepentingan ekonomi dan politik sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, tidak hanya dilakukan dengan upaya diplomatik semata. Pemerintah Tiongkok juga aktif melakukan pembangunan infrastruktur militer di kepulauan yang ada di Laut China Selatan. Sejak tahun 2013, Tiongkok telah melakukan reklamasi seluas 3.200 hektare di sekitar Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.

Reklamasi yang dilakukan Pemerintah Tiongkok, diiringi dengan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang, sekaligus infrastruktur militer. Fasilitas penunjang yang dimaksud, terdiri dari pembangunan pelabuhan serta gedung-gedung administrasi. Sedangkan infrastruktur militer yang dibangun, terdiri dari pengembangan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat. Sistem rudal yang dimaksud, merupakan sistem persenjataan basis darat berkapabilitas tinggi yang digunakan Tiongkok di wilayah-wilayah sengketa.<sup>27</sup> Tiongkok juga memperlihatkan ambisinya di Laut China Selatan, dengan menempatkan personel militer dan paramiliternya. Dengan ini, Pemerintah Tiongkok secara otomatis meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan

<sup>26</sup> diakses dari,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/06/tiongkok-kuasai-ekspor-jalur-laut-cina-selatan>, pada tanggal 25 april 2023 pukul 12.30 pm

<sup>27</sup> Department of Defense of the United States of America, "China Military Power Report 2020", hal. 75

menjaga kedaulatannya di Laut China Selatan dan mempertahankan hegemoni atas klaimnya di kawasan sekitar.

## **GAMBARAN KEKUATAN DAN STRATEGI INDONESIA SERTA AUSTRALIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK KEAMANAN TRADISIONAL DAN NON TRADISIONAL DI LAUT CHINA SELATAN**

### **Postur Pertahanan Australia**

Dalam melihat postur Pertahanan Australia dipergunakan tinjauan postur kekuatan yang dirilis oleh *Defence Departments*. Pada tahun 2012, *Defence Departments* merilis tinjauan postur kekuatan, yang kemudian digantikan oleh *The Strategic and Capability Judgements Outlined in the Australian Governments 2020 Defence Strategic Update*. Pembaruan tersebut berisikan mengenai harapan dari *Australian Defence Force* (ADF) terhadap beragam segi keamanan mulai dari kemanusiaan, bencana, hingga pada operasi keamanan dan stabilitas di wilayah terdekat.<sup>28</sup>

*The Australian Defence Force* (ADF) merupakan organisasi militer yang memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan Australia beserta kepentingan nasionalnya. ADF terdiri atas *Australian Army*, *Royal Australian Navy* (RAN), *Royal Australian Air Force* (RAAF), dan beberapa unit “*tri-service*”. Kekuatan

dari ADF melebihi 90.000 personel penuh waktu dan cadangan aktif dan didukung oleh *Department of Defence* dan beberapa badan sipil lainnya.

ADF memiliki teknologi canggih tetapi relatif kecil. Pertanggal 30 Juni 2021, kekuatan aktual dari ADF termasuk Cadangan ialah sebanyak 89.309 personel, dan tenaga kerja setara penuh waktu aktual ialah sebanyak 17.108, menjadikannya militer terbesar di Oseania<sup>29</sup>, ADF lebih kecil daripada sebagian besar kekuatan militer Asia. Meskipun demikian, ADF diketahui didukung oleh anggaran yang signifikan menurut standar dunia dimana untuk tahun 2020-2021, *Department of Defence* melaporkan surplus kas sebesar 270 Juta USD terhadap total pendanaan yang tersedia lebih dari 42 Miliar USD. Basis aset pertahanan bernilai lebih dari 119 Miliar USD, mencakup lebih dari 74 Miliar USD peralatan militer khusus. ADF dapat mengerahkan pasukan di berbagai lokasi di luar Australia.

Dalam pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, bahwasanya Australia saat ini sedang menghadapi masa yang paling menantang sejak 1930-an dan awal 1940-an. Hal tersebut ditunjukkan pada lingkungan strategis Australia yang memburuk dengan cepat dalam dua tahun terakhir.<sup>30</sup> Pembaruan 2020 menginstruksikan bagaimana Australia dapat menyesuaikan kemampuan dan kesiapan militernya dalam menanggapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh persaingan kekuatan besar, *grey-zone*

---

<sup>28</sup> Marcus Schultz, *The Defence of Australia Requires a New Force Posture Review*, diakses dari ASPI: Australian Strategic Policy Institute di <https://www.aspistrategist.org.au/thedefence-of-australia-requires-a-new-force-posture-review/> pada Rabu, 26 April, pukul 03:48

---

<sup>29</sup> Australian Government Department of Defence, *Defence Annual Report 2020-2021*, (Canberra: Australian Government, 2021), h. ii

<sup>30</sup> Marcus Schultz, *The Defence of Australia Requires a New Force Posture Review*,

*activities*<sup>31</sup>, dan percepatan kemampuan militer regional. Scott Morrison juga menugaskan ADF untuk kemudian memiliki kesiapan dalam menanggapi prospek militer dengan intensitas yang tinggi di Indo Pasifik, jika perlu dengan kekuatan yang kredibel. Secara garis besar, lingkungan strategis Australia ini sangatlah kontras dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam tinjauan postur kekuatan tahun 2012 yang kini telah digantikan oleh pembaruan tahun 2020.

Pentingnya postur pertahanan bagi negara dan perbedaan nyata dalam lingkungan strategis antara tahun 2012 dan 2022, Pemerintah Australia belum berkomitmen untuk mempertimbangkan kembali secara formal postur dari ADF. Pemerintah harus segera menindak lanjuti pembaruan 2020 dengan tinjauan postur kekuatan baru untuk menjembatani silo departemen dan yuridiksi yang menempatkan batasan yang jelas pada perencanaan pertahanan disaat ketidakpastian yang meningkat. Secara khusus, hal tersebut memusatkan perhatian pada kebutuhan strategis yang berkembang untuk mempertahankan pendekatan maritim Australia yang ekstensif.

Dimensi ancaman yang berubah membuat Australia meningkatkan pengeluaran pertahanannya. Di tahun 2018, dana militer Australia sebesar 26,8 Miliar USD, namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 26 Miliar USD. Di tahun berikutnya pendanaan militer ditingkatkan kembali menjadi 27,3 Miliar

USD. Peningkatan tersebut ditingkatkan kembali secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 31,7 Miliar USD. Selain dalam hal pendanaan, Australia juga meningkatkan personel militernya. Dimana pada data diatas ditunjukkan bahwa pada tahun 2018, Australia memiliki personel militer sebanyak 58.100 personel, kemudian ditingkatkan pada tahun 2019 menjadi 59.000 personel. Tak berhenti disitu, Australia meningkatkan lagi jumlah personel militernya menjadi 63.000 personel, dan peningkatan yang paling signifikan ialah di tahun 2021, dimana dari 63.000 personel menjadi 89.000 personel.

Lebih lanjut, pada hal transfer persenjataan, tahun 2017 Australia melakukan ekspor persenjataan sebesar 0,098 Miliar USD, dibarengi dengan impor persenjataan sebesar 1,65 Miliar USD. Di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2018 Australia mengalami penurunan dalam hal ekspor persenjataan sebesar 0,038 Miliar USD, kemudian dalam hal impornya kembali menurun menjadi 1,56 Miliar USD. Ekspor persenjataan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 0,103 Miliar USD, namun dalam hal impor mengalami penurunan menjadi 1,18 Miliar USD. Pada tahun 2020, ekspor dan impor persenjataan Australia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana sebesar 2,8 Miliar USD untuk ekspor, dan sebesar 1,66 Miliar USD untuk impor.

Berdasarkan data yang ada mengenai pengeluaran militer Australia menunjukkan peningkatan dalam setiap tahunnya, selain itu juga personel aktif militer Australia mengalami peningkatan yang signifikan. Ditunjang oleh data mengenai transfer senjata yang menunjukkan dalam hal impor meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun di tahun berikutnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lalu, untuk

---

<sup>31</sup> The Forge, dalam *Grey-zone Activities and The ADF*, oleh Dobbs, et. al. Grey-zone activities didefinisikan sebagai sebuah tindakan kenegaraan yang memaksa tanpa perang. Grey-zone merupakan domain non-militer dari aktivitas manusia di mana negara menggunakan sumber daya nasional untuk secara sengaja memaksa negara lain

ekspor pada tahun 2017-2019 meningkat tidak begitu signifikan, namun pada tahun 2020 angkanya menembus hingga 2,8 Triliyun. Sehingga dari data-data yang ditunjukkan dapat menampakkan bagaimana postur keamanan Australia sebagai salah satu negara dengan personel militer terbesar di Oseania.

Mengutip dari Global Fire Power ukuran militer Australia berada di urutan ke 16 dengan memiliki kekuatan tempur personel garis depan sebanyak 60.500, 59 tank, 353 pesawat tempur, 43 Kapal angkatan laut termasuk 6 kapal selam. Selanjutnya untuk pembelanjaan pertahanan Australia di 2023 masuk ke dalam 8 besar sebanyak \$52 miliar.<sup>32</sup> Namun, populasi Australia berada di peringkat ke 54 dengan total populasi 25.978.935 orang pada 30 Juni 2022. Negara-negara kekuatan menengah bereaksi terhadap variabel ancaman yang dirasakan dalam bentuk ketidakstabilan global secara umum sebagai lawan dari musuh nasional atau kolektif tertentu.<sup>33</sup> Karakteristik kunci kekuatan menengah adalah kurangnya kemampuan untuk melindungi negaranya dalam masalah internasional tanpa kerja sama keamanan bilateral atau multilateral.

### **Postur Pertahanan Indonesia**

Berdasarkan data, pengeluaran militer Indonesia mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh banyak hal. Pada tahun 2018, pengeluaran militer Indonesia ialah

sebesar 7,5 Miliar USD. Di tahun berikutnya tepatnya di tahun 2019, Indonesia meningkatkan kembali pengeluaran militernya menjadi 8,2 Miliar USD. Angka tersebut terus Indonesia tingkatkan menjadi 9,4 Miliar USD pada tahun 2020. Hingga pada tahun 2021, Indonesia sedikit menekan pengeluaran militernya menjadi 8,2 Miliar USD.

Sebenarnya peningkatan anggaran belanja alutsista merupakan sesuatu yang wajar bagi negara-negara di dunia. Namun, analisis pertahanan dan keamanan menyebutkan bahwa yang dilakukan Indonesia menunjukkan bagaimana kekhawatiran Indonesia atas posisinya ditengah hadirnya ancaman di kawasan, China di Laut China Selatan. Tak main-main, Indonesia menganggarkan Rp. 1.760 Triliun untuk alutsistanya hingga 2024.

Global Fire Power mencatat pada Januari 2021 dimana Indonesia menempati posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat, untuk anggaran yang bernilai Rp. 98 Triliun. Namun, Pemerintah dalam beberapa waktu kemudian melalui Kementerian Pertahanan mengupayakan peningkatan anggaran dengan modernisasi alutsista TNI AD, AL, dan AU hingga bernilai Rp. 1.760 Triliun. Peningkatan anggaran ini menurut Kementerian Pertahanan merupakan hal yang sangat penting, dimana Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Kementerian Pertahanan membuat masterplan atau rencana induk 25 tahun kemampuan pertahan Republik Indonesia<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> (Global Fire Power), 2023, diakses dari [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=australia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=australia), pada tanggal 27 April 2023 pukul 21.30pm

<sup>33</sup> M. Douch and B. Solomon, (2014), 'Middle Powers and the Demand for Military Expenditures', Defence and Peace Economics, Francis & Taylor. Vol. 24, No 6. hal 15

---

<sup>34</sup> Malcolm Cook. CNN Indonesia, Pengembangan Alutsista Jadi Investasi Pertahanan, diakses dari CNN Indonesia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210906040039-20-690057/pengembangan->

Dalam hal personel militer, jumlah personel militer Indonesia terbilang besar untuk negara middle power. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2018 jumlah personel Indonesia sebesar 975.750 personel. Kemudian meningkat menjadi 982.200 personel di tahun 2019. Tak berhenti disitu, Indonesia meningkatkan kembali personelnnya menjadi 995.900 personel di tahun 2020. Dan peningkatan cukup signifikan ditunjukkan pada tahun 2021, Indonesia memiliki 1.075.500 personel. Dalam hal ekspor dan impor persenjataan, cukup menarik untuk dilihat. Dimana dengan pengeluaran yang begitu besar, tidak berbanding lurus dengan ekspor dan impor persenjataannya. Data menunjukkan di tahun 2017, Indonesia melakukan impor persenjataan sebesar 1,1 Miliar USD. Namun di tahun 2018 menurun menjadi 329 Juta USD, lalu di tahun 2019 menurun kembali menjadi 217 Juta USD. Di tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 270 Juta USD. Begitu pula dengan ekspornya, di tahun 2017 sebesar 95 Juta USD, kemudian di tahun 2018 menurun kembali menjadi 15 Juta USD, dan di tahun berikutnya, 2019 menurun menjadi 9 Juta USD. Dapat dilihat dari grafik bagaimana postur keamanan Indonesia, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan dalam military expenditure sebesar 8,2 M, akan tetapi di tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu, dalam personil aktif militernya, Indonesia terus meningkatkan jumlah personilnya dan menunjukkan eksistensinya sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut didukung dengan impor senjata yang pada tahun

---

alutsista-jadi-investasi-pertahanan pada  
Senin, 29 April 2023, pukul 09:50 am

2017-2019 mengalami penurunan yang cukup drastis, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 270 Juta USD.

### **Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan**

Perubahan dinamika ancaman yang dihadapi Indonesia mendorong berubahnya doktrin militer Indonesia. Menyikapi dinamika ancaman yang dihadapi Indonesia, diubahlah doktrin TNI menjadi Tri Darma Eka Karma yang disahkan pada tahun 2010 melalui Peraturan Panglima TNI.<sup>35</sup> Doktrin tersebut didasarkan kepada Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 yang menyebutkan mengenai fokus Indonesia terhadap keamanan wilayah maritim, khususnya wilayah-wilayah perbatasan. Doktrin pertahanan maritim tersebut sejalan dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan fokus terhadap upaya membangkitkan kembali kesadaran Indonesia sebagai negara maritim. Posisi Indonesia yang strategis memiliki pengaruh terhadap geopolitik sehingga harus memperhatikan potensi peluang dan ancaman yang ada sebagai wujud perlindungan wilayah kedaulatan.

China melakukan klaim nine-dash line atas teritori di Laut China Selatan menyengol Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Utara Natuna sebagaimana yang telah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Seketika, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bersama dengan Menteri Pertahanan, Prabowo

---

<sup>35</sup> Muhammad Khusna Bayu Hardianto, Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia sebagai Negara Maritim, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 12

Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap tegas penolakan atas klaim yang dilakukan oleh China. Disisi lain, penolakan Indonesia tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan China. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2016 menyebutkan, bahwa posisi Laut China Selatan merupakan posisi yang strategis dengan berbagai pertarungan di dalamnya. Kekuatan tersebut dapat menimbulkan ancaman, dimana salah satu cara untuk menghadapi kekuatan yang mengancam tersebut ialah dengan sebuah kebijakan yang strategis.<sup>36</sup>

### **Kebijakan Hedging Indonesia Terhadap Konflik di Laut China Selatan**

Dari Keterangan di atas dan dianalisis melalui beberapa sumber menunjukkan bahwasanya Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok di Laut China Selatan, yaitu kebijakan hedging.<sup>37</sup> Hedging didefinisikan sebagai sebuah strategi dimana negara tersebut tidak yakin dengan intensi sumber ancamannya. Dimana strategi ini memungkinkan negara kemudian menjalin hubungan dengan partner yang perilakunya tidak dapat ditebak di masa mendatang.

---

<sup>36</sup> Avery Goldstein, Power Transition, Institutions, and China's Rise in East Asia: Theoretical Expectations and Evidence, *Journal of Strategic Studies*, Vol. 30, No. 4-5, 2007, h. 640.

<sup>37</sup> Dewi Fortuna Anwar, Indonesia's Response to China's Rise, diakses dari Project for Peaceful Competition di <https://www.peacefulcompetition.org/pub/brdt54wm/release/1?readingCollection=0998716> pada Jumat, 29 April 2023, pukul 02:02 pm

Kebijakan hedging cukup beragam di suatu negara, menurut Kuik Cheng Chwee hedging dapat dilakukan dengan limited bandwagoning, perjanjian yang mengikat, pragmatism ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan indirect balancing.<sup>38</sup> Semua strategi tersebut ialah bentuk pemaksimalan keuntungan dan meminimalisir risiko. Cheng-Chwee menjelaskan terdapat tiga elemen dalam memperoleh memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko, yaitu:

- 1) desakan untuk tidak memihak dengan jelas kekuatan yang bersaing;
- 2) mengambil tindakan yang berlawanan dengan lawan; dan
- 3) menggunakan tindakan yang berlawanan sebagai instrumen dalam mengejar tujuan mempertahankan keuntungan sambil memupuk posisi.<sup>39</sup>

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah melakukan strategi hedging terhadap China yang melakukan klaim terhadap teritorial di Laut China Selatan dikarenakan telah memenuhi faktor resistensi dan engagement, dimana ditunjukkan dalam tiga perilaku, yaitu: Pertama, indirect balancing yang dilakukan Indonesia dengan Australia, sebagai sebuah aktor eksternal yang merupakan sekutu Amerika Serikat yang dinilai dapat "menetralkan" pengaruh Tiongkok, khususnya dalam bidang

---

<sup>38</sup> Aisha R. Kusumasomantri, Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17, No. 1, 2015, h. 51

<sup>39</sup> Kuik Cheng-Chwee, How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China, *Journal of Contemporary China*, Vol. 25, No. 100, h. 502.

keamanan dan pertahanan. Hubungan Indonesia dengan Australia tetap terjalin dengan hangat meski Indonesia begitu dekat dengan Tiongkok, meski juga hubungan diantara keduanya seringkali mengalami pasang-surut diwarnai oleh beragam permasalahan. Hubungan keduanya terus dijaga dengan maksud mengawasi Tiongkok yang sewaktu-waktu dapat bergerak dari “sahabat” menjadi “ancaman”.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia menjalin kerjasama pertahanan dengan Australia dalam kerangka keamanan, kontra-terorisme, dan stabilitas sub-regional Indo-Pasifik. Begitu memasuki pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi, kerjasama pertahanan ditingkatkan dalam bentuk kerjasama komprehensif *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Kedua, dominance denial dilakukan Indonesia dengan cara yang sama dengan indirect balancing, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan Australia. Indonesia pernah khawatir akan hadirnya pengaruh China dalam politik domestik Indonesia pada tahun 1965. Kekhawatiran itu juga hadir di Pemilihan Presiden tahun 2019, dimana turut serta dalam politik, investasi, dan bisnis di Indonesia.<sup>40</sup> Walau dimasa-masa seperti ini, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China baik-baik saja, Indonesia dalam hal ini berusaha agar pengaruh China tidak masuk dan terlalu mewarnai politik domestiknya.

---

<sup>40</sup> Rehia Sebayang, Investasi China di Tengah Pusaran Pilpres 2019, diakses dari CNBC Indonesia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190416172307-4-67155/investasi-china-ditengah-pusaran-pilpres-2019> pada Selasa, 26 Juli 2022, pukul 05:22 pm

Hal tersebut juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, ASEAN berusaha menciptakan dynamic equilibrium diantara negara-negara eksternal kawasan, khususnya Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia dengan tujuan agar kawasan terbebaskan dari pengaruh dan dominasi negara mana saja.<sup>41</sup> Ketiga, strategi hedging Indonesia ditunjukkan pada pragmatisme ekonomi yang merupakan pendorong utama hubungan Indonesia dengan China, dan itu penyebab kenapa kecaman keras Indonesia hanyalah sebagai sebuah gertakan semata. Sebagai bagian dari opsi memaksimalkan keuntungan, Indonesia terlibat dalam beberapa proyek strategis China seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Tiongkok mendanai proyek-proyek pembangunan infrastrukturnya yang ambisius. Posisi Indonesia di Laut China Selatan terkadang juga samar-samar, hal tersebut terlihat dari tanggapan Indonesia yang bungkam terhadap putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) yang membuat marah Beijing.

### **Strategi Australia Dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan**

Strategi Australia di kawasan Indo-Pasifik adalah pendekatan komprehensif yang menggabungkan tindakan diplomatik dan militer untuk mencapai berbagai tujuan. Dengan fokus pada mempromosikan stabilitas regional dan melindungi kepentingan nasional, Australia secara aktif terlibat dengan negara-negara lain di kawasan ini melalui saluran diplomatik dan menekankan pentingnya kebebasan

---

<sup>41</sup> Aisha R. Kusumasomantri, Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17, No. 1, 2015, h. 53

navigasi.<sup>42</sup> Untuk menyeimbangkan kehadiran militer China yang semakin meningkat di Indo-Pasifik, Australia telah meningkatkan kerja sama pertahanannya dengan sekutu. Dengan memperkuat aliansi dan kemitraan, Australia bertujuan untuk meningkatkan posisi keamanan regionalnya dan merespons tantangan potensial dengan efektif. Pendekatan ini tidak hanya melayani kepentingan nasional Australia tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional secara keseluruhan.<sup>43</sup>

Australia juga memainkan peran penting dalam mempromosikan tatanan berdasarkan aturan, terutama di Laut China Selatan. Dengan menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai, Australia mendorong semua pihak yang terlibat untuk terlibat dalam dialog dan patuh pada hukum dan peraturan internasional. Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana konflik dapat diselesaikan tanpa menggunakan tindakan militer, menjaga stabilitas kawasan.

Selain itu, Australia secara aktif bekerja menuju visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dengan berkolaborasi dengan sekutu dan mitra, Australia berusaha untuk membangun kawasan yang lebih terhubung, makmur, aman, dan tangguh. Visi ini mencakup penguatan ikatan ekonomi, mendorong pertukaran budaya, dan mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia.<sup>44</sup> Secara keseluruhan, strategi Australia di Laut China Selatan ditandai oleh pendekatan yang seimbang dan proaktif. Dengan memprioritaskan stabilitas regional, melindungi kepentingan nasional, menganjurkan tatanan berdasarkan aturan, dan berkolaborasi dengan sekutu dan mitra, Australia berkontribusi pada kawasan Indo-Pasifik yang aman dan makmur.

### **Kebijakan Balance of Power Australia Terhadap Konflik di Laut China Selatan**

Strategi Balance of Power Australia di Laut China Selatan melibatkan kombinasi langkah-langkah diplomasi dan militer yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas regional sambil melindungi kepentingan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat kemitraan strategisnya di wilayah tersebut, termasuk bergabung dengan aliansi Quad dan Aukus.<sup>45</sup>

Quad, juga dikenal sebagai Dialog Keamanan Empat Negara, adalah forum strategis yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Forum ini bertujuan untuk mempromosikan wilayah Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur, serta menghadapi pengaruh militer dan ekonomi yang semakin meningkat dari Tiongkok di wilayah tersebut. Sebagai anggota Quad, Australia bekerja dengan mitra-mitranya untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional, serta mempertahankan tatanan berbasis aturan di wilayah tersebut.

Pada September 2021, Australia mengumumkan partisipasinya dalam aliansi Aukus, kemitraan keamanan tiga pihak

---

<sup>42</sup> Gabriele Abbondanza, *Whither the Indo-Pacific? Middle power strategies from Australia, South Korea and Indonesia*, *International Affairs*, Volume 98, Issue 2, March 2022, hal 403–421.

<sup>43</sup> Soumyodeep Deb and Nathan Wilson, "The Coming of Quad and the Balance of Power in the Indo-Pacific", *Journal of Indo-Pacific Affairs*, Air University Press, hal 1

---

<sup>44</sup> White House, "US-Indo Pacific Strategy 2022", hal 7

<sup>45</sup> European Parliament, *Australia Strategic View of The Indo-pacific*, hal 8

antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Aliansi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan di wilayah Indo-Pasifik, terutama menghadapi kehadiran militer yang semakin meningkat dari Tiongkok. Sebagai bagian dari aliansi ini, Australia akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, yang akan signifikan meningkatkan kemampuan angkatan lautnya di wilayah tersebut.

Strategi Indo-Pasifik Australia difokuskan pada mempromosikan wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bersama dengan sekutu dan mitra, untuk menciptakan wilayah yang lebih terhubung, makmur, aman, dan tangguh. Strategi ini didasarkan pada komitmen untuk mempertahankan tatanan internasional berdasarkan aturan, yang mencakup kebebasan berlayar dan terbang, menghormati hukum internasional, serta penyelesaian damai sengketa.

Selain partisipasinya dalam Quad dan aliansi Aukus, Australia berinteraksi dengan negara-negara lain di wilayah tersebut dan mendukung kebebasan berlayar, sambil juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan sekutu untuk menghadapi kehadiran militer yang semakin meningkat dari Tiongkok di wilayah tersebut. Negara ini mempromosikan tatanan berbasis aturan di Laut China Selatan dan mendorong semua pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai. Secara keseluruhan, strategi keseimbangan kekuatan Australia di wilayah Indo-Pasifik difokuskan pada mempromosikan stabilitas regional dan mempertahankan tatanan berbasis aturan, sambil melindungi kepentingan nasional di tengah persaingan strategis yang semakin meningkat dan ketegangan geopolitik.

## **Posisi Indonesia dan Australia Sebagai Kekuatan Middle Power di Asia Pasifik**

Indonesia dan Australia, sebagai kekuatan menengah di Asia Pasifik, memainkan peran penting dalam dinamika regional. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan lokasinya yang strategis, merupakan pemain kunci di ASEAN, memperjuangkan kerja sama regional dan menjaga stabilitas. Australia, yang terkenal dengan ekonomi yang kuat dan kemampuan militer, aktif terlibat dalam forum multilateral seperti Quad dan Aukus, mempromosikan tatanan berbasis aturan dan menghadapi tantangan keamanan. Kedua negara berkontribusi pada pembangunan regional, menjaga keamanan maritim, dan mendorong kemitraan ekonomi. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia dan Australia berusaha membentuk lanskap Asia Pasifik, menyeimbangkan kepentingan dan mempromosikan perdamaian serta kemakmuran di wilayah tersebut.

## **Indonesia Sebagai Kekuatan Middle Power**

Indonesia adalah faktor berpengaruh di Indo-Pasifik, dengan empat alasan utama. Pertama, kapabilitas materinya yang besar, sebagai ekonomi ke-16 dan populasi keempat terbesar di dunia. Kedua, Indonesia menunjukkan ambisi kekuasaan besar dengan pandangan dunia moderat. Ketiga, Indonesia tidak memihak AS atau Tiongkok, sehingga bisa disebut sebagai kekuatan menengah "skeptis". Keempat, Jakarta adalah pemimpin informal ASEAN, mewakili potensi "tiang ketiga" di Indo-Pasifik. Meski definisi sulit, Indonesia dianggap sebagai kekuatan menengah naik daun dengan kapabilitas materi,

keanggotaan G20, kepemimpinan ASEAN, dan diplomasi kekuatan menengahnya.<sup>46</sup>

Indonesia terperangkap dalam persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menjaga keseimbangan antara hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan kemitraan strategis dengan AS. Tiongkok adalah mitra perdagangan utama Indonesia, tetapi Jakarta tidak memiliki perjanjian pertahanan dengan AS atau sekutunya. Sebagai gantinya, Indonesia mengikuti kebijakan luar negeri bebas dan aktif, menekankan kemerdekaan dan non-intervensi. Kebijakan luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh kerja sama ASEAN dengan AS, Australia, dan Jepang, yang berfokus pada keamanan maritim dan forum regional. Meskipun menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Indonesia berusaha menjaga kebijakan luar negeri yang mandiri dan beragam, menghindari aliansi formal dan mengutamakan kepentingan nasionalnya.<sup>47</sup>

Postur regional Indonesia memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi visinya tentang Indo-Pasifik. Ini mencari otonomi strategis dan non-blok, dipengaruhi oleh latar belakang lama persaingan AS-Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya. Penerimaan dan promosi Indo-Pasifik sebagai lingkup pengaruhnya didorong oleh rasa hak geopolitik dan pengejaran kepemimpinan regional.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Mark Beeson, Alan Bloomfield and Wahyu Wicaksana, 'Unlikely allies? Australia, Indonesia and the strategic cultures of middle powers', *Asian Security* 17: 2, 2020, hal 178–194

<sup>47</sup> David M. Lampton, Selina Ho and Cheng-Chwee Kuik, *Rivers of iron: railroads and Chinese power in southeast Asia* (Berkeley: University of California Press, 2020), hal 151–181.

<sup>48</sup> Shekhar, *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century*, hal 119.

Postur regional Indonesia bertujuan untuk membangun "jalan ketiga" di Indo-Pasifik, menekankan sentralitas ASEAN, otonomi strategis, non-blok, dan kemakmuran ekonomi. Ini berusaha untuk memberikan alternatif bagi dominasi Sino-Amerika di wilayah tersebut. Visi ini dituangkan dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan melambangkan potensi kekuatan menengah untuk membentuk visi regional yang kooperatif. Namun, Jakarta juga mewujudkan kelemahan yang terkait dengan konsep ini. Sikap regionalnya mewakili tujuan dan pengaruh kolektif ASEAN, tetapi tantangan tetap ada.<sup>49</sup>

Strategi Indo-Pasifik Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasinya. Kemampuan angkatan laut yang lemah merusak kebijakan maritimnya, meningkatkan risiko dari persaingan AS-Tiongkok. Prioritas domestik menghambat integrasi regional. ASEAN, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan di tengah ketegangan, berisiko tidak relevan. Kebangkitan Indonesia terhalang oleh kelemahan militer, kekurangan teknologi, koordinasi kelembagaan, kerentanan sosial, dan disfungsi politik. Untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya yang ambisius, Jakarta harus mengatasi kerapuhan ini. Namun, peran Indonesia dalam merumuskan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik memperkuat kepemimpinan informalnya, meningkatkan status kekuatan menengahnya, dan menawarkan cara ketiga untuk melawan politik negara adidaya. Tekanan meningkat pada Indonesia untuk

---

<sup>49</sup> ASEAN, *ASEAN outlook on the Indo-Pacific* (Bangkok, 2019),

memandu ASEAN secara efektif di tengah perairan yang bermasalah.<sup>50</sup>

### **Australia Sebagai Kekuatan Middle Power**

Australia sebagai kekuatan menengah 'tradisional' dengan akar statusnya dari persiapan konferensi San Francisco 1945. Kebijakan luar negeri Australia yang semakin mengutamakan keamanan dan perdagangan, mengategorikannya sebagai kekuatan menengah pragmatis. Australia memiliki pengaruh global dan peran penting di Indo-Pasifik, tetapi sulit untuk ditempatkan secara tepat karena kondisi 'liminalitas' yang sering dikutip, yaitu tidak dianggap berada di dalam maupun di luar Indo-Pasifik.<sup>51</sup>

Australia menghadapi dilema terkait keterhubungannya dengan dua superpower yang bersaing. Di satu sisi, Australia adalah sekutu resmi Amerika Serikat melalui Perjanjian ANZUS 1951. Namun, hal ini bertentangan dengan hubungan ekonomi besar Australia dengan Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra perdagangan terbesar Australia (senilai 175 miliar dolar AS pada 2020), dan memiliki perjanjian perdagangan bebas sejak 2015. Pembagian keamanan dan perdagangan antara Washington dan Beijing sulit dikelola Australia di tengah ketegangan bilateral dan regional, serta pandemi COVID-19 yang memperburuk hubungan diplomatik.

Ketegangan baru-baru ini di Indo-Pasifik mendorong Canberra untuk lebih berkomitmen pada tujuan Amerika Serikat

dan mengejar visi yang lebih tegas untuk wilayah tersebut. Visi ini menekankan elemen normatif dan sikap multilateralis, namun juga bertujuan untuk memperkuat keseimbangan kekuasaan melalui serangkaian aliansi dan inisiatif minilateral yang terhubung dengan Washington.

Perjanjian formal meliputi perjanjian pertahanan atau aliansi penuh antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara kunci di Indo-Pasifik, termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina, Pakistan, dan Taiwan. Inisiatif minilateral utamanya diwakili oleh Quad dengan Amerika Serikat, Jepang, dan India, serta kemitraan trilateral yang ditingkatkan dengan Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS), keduanya menekankan visi keamanan untuk Indo-Pasifik. Australia memainkan peran penting dalam kedua perjanjian dan platform minilateral ini, dan oleh karena itu merupakan pendukung teguh strategi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat.<sup>52</sup>

Sikap regional yang dihasilkan - agak ragu-ragu hingga tahun 2017, lebih teguh setelahnya - menunjukkan bahwa Canberra telah meninggalkan kebijakan sebelumnya yang disebut "ketidakjelasan strategis", yang berguna dalam memperkuat diplomasi kekuatan menengahnya, dan kini mengejar "keselarasan strategis" yang baru dan tegas dengan Amerika Serikat. Saat kepentingan nasional Australia semakin sejalan dengan AS, visi regionalnya mendukung prinsip "aturan berbasis", yang sejalan dengan strategi AS dan Jepang mengenai Indo-Pasifik. Hal ini terlihat jelas dalam Pembaruan Strategi Pertahanan

---

<sup>50</sup> Shekhar, "Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century", hal 239.

<sup>51</sup> Richard A. Higgott and Kim R. Nossal, 'The international politics of liminality: relocating Australia in the Asia Pacific', *Australian Journal of Political Science* 32: 2, 1997, hal 169–86.

---

<sup>52</sup> Prime Minister of Australia, Joint leaders statement on AUKUS, Canberra, 2021, diakses dari <https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus>. Pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 22.00 pm

Australia tahun 2020, di mana Canberra mengakui bahwa "Indo-Pasifik berada di pusat persaingan strategis yang lebih besar, membuat wilayah tersebut semakin diperebutkan", yang didasarkan pada "fokus pada penguatan keterlibatan internasional, terutama dengan Amerika Serikat, Jepang, India, ASEAN, dan sekutu serta mitra lainnya", dengan "peningkatan upaya China dalam memperoleh pengaruh yang lebih besar di Indo-Pasifik" sebagai salah satu keprihatinan strategis utama. Lebih jauh lagi, meskipun terjadi peningkatan nominal ekspor Australia ke Tiongkok sepanjang pandemi, jika dilihat lebih dalam, tampak bahwa kasus pemaksaan ekonomi dari Beijing telah banyak dan terus meningkat sejak tahun 2017, yang kemungkinan membuat lebih mudah bagi Canberra untuk meninggalkan "ketidakjelasan strategis" yang dijaga dengan penuh perhatian dan melengkapi pergeserannya dalam hal sikap regional. Perubahan ini, pada gilirannya, lebih dari sekadar menjadi hambatan bagi gagasan "koalisi kekuatan menengah" di Indo-Pasifik, karena skeptis dan kritikus kemungkinan akan diperkuat dalam persepsi mereka terhadap Canberra sebagai platform untuk proyeksi kekuatan AS<sup>53</sup>

Penyesuaian progresif ini terhadap lanskap regional yang berkembang merupakan aset bagi diplomasi kekuatan menengah Australia sekaligus batasan dari kemampuan negara tersebut untuk mencapai tujuannya. Di satu sisi, Canberra telah berhasil mengkoordinasikan kebijakan luar negeri baru dengan mitra Quad sejak 2017 dan mitra AUKUS sejak 2021. Selain itu, Australia secara aktif mendukung penambahan ad hoc atau bergilir Korea

Selatan, Vietnam, dan Selandia Baru ke dalam "Quad Plus". Hal ini menunjukkan niat untuk memperkuat pendekatan multilateral dan normatif dengan mitra regional yang sejalan, mengikuti tradisi pragmatis kekuatan menengah Australia, dan jaringan aliansi yang semakin berkembang ini menunjukkan bahwa Australia berusaha memanfaatkan multipolaritas wilayah tersebut untuk mengejar kepentingan regionalnya, yang berwujud visi berbasis aturan dan dipimpin oleh AS untuk Indo-Pasifik. Namun demikian, dengan keterbatasan kapabilitas dan ketergantungan strategisnya pada Amerika Serikat, kapasitas Australia untuk mewujudkan visi ini jelas bergantung pada kebijakan pembatasan yang terus dilakukan oleh negara-negara Quad (Plus) dan AUKUS.<sup>54</sup>

#### **IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK KEAMANAN TRADISIONAL DI LAUT CHINA SELATAN**

##### **Kerjasama Pertahanan dan keamanan Indonesia dengan Australia**

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Australia telah terjalin sejak tahun 1972 dalam bentuk *Defence Cooperation* (Defco) dimana meliputi kerjasama dalam bidang operasi, logistik, dan pemetaan. Pada tahun 1986, kerjasama antara Indonesia-Australia dalam bidang pertahanan sempat terhenti disebabkan penurunan dalam hal hubungan diplomatik Indonesia-Australia disebabkan kasus wartawan Australia David Jenkins, dimana memberikan pengaruh terhadap kemampuan TNI dalam pemeliharaan

---

<sup>53</sup> William Tow, 'Deputy sheriff or independent ally? Evolving Australian-American ties in an ambiguous world order', *Pacific Review* 17: 2, 2004, hal 271-90.

---

<sup>54</sup> Australian Department of Defence, 2020 defence strategic update, p. 15.

komunikasi TNI-AD, Pesud Nomad TNI-AL, Pesud T-56 TNI-AU, hingga pada terhentinya program pendidikan dan pelatihan personel TNI di Australia.<sup>55</sup>

Perkembangan selanjutnya dimulai kembali dengan kerjasama TNI dengan Australian Defence Force (ADF), dimana ditandai dengan adanya penandatanganan terhadap Persetujuan Pemeliharaan Keamanan antara Pemerintah Indonesia dengan Australia (Agreement Between the Government of the Indonesia and the Government of Australia on Maintaining Security) pada tanggal 18 Desember 1995 di Jakarta. Namun kerjasama tersebut kembali mengalami pasang surut, hal ini secara umum dipengaruhi oleh sikap politik dari Australia terhadap Indonesia, yang mana puncaknya pada tahun 1999 sikap dan peranan dari Australia dinilai oleh Indonesia kurang berhasabat, khususnya dalam permasalahan Timor-Timur. Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1999 tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia dalam Bidang Keamanan Bersama.<sup>56</sup> Di masa-masa berikutnya, hubungan kerjasama keduanya berjalan harmonis hingga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo .

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerjasama antara Indonesia dan Australia terfokus pada perdamaian, stabilitas, dan keamanan maritim. Dialog-dialog seperti pertemuan 2+2 Ministerial Meetings dan Annual Leader's Meeting menekankan pentingnya perdamaian, sentralitas ASEAN, dan penghormatan

terhadap kedaulatan dan hukum internasional di Indo-Pasifik.

Peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tercermin dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia pada Februari 2017,<sup>57</sup> yang menghasilkan kesepakatan kerjasama maritim melalui penandatanganan Joint Declaration on Maritime Cooperation. Kunjungan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ke Jakarta pada Agustus 2018 juga menunjukkan perbaikan hubungan antara kedua negara. Pada masa pandemi COVID-19 yang baru berakhir pada 5 Mei 2023, kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia menjadi lebih penting dalam menghadapi tantangan bersama dan memastikan keamanan regional. Kedua negara telah menjalin kerjasama yang erat dalam berbagai bidang, termasuk penanganan kesehatan, operasi penegakan hukum, dan kerjasama militer.

Dalam konteks penanganan kesehatan, Indonesia dan Australia saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menghadapi COVID-19. Kedua negara bekerja sama dalam pertukaran informasi, bahan medis, dan pengalaman penanganan pandemi. Australia memberikan bantuan medis dan peralatan kesehatan kepada Indonesia, termasuk dukungan dalam hal distribusi vaksin. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kedua negara dalam menangani dampak pandemi dan memastikan kesehatan masyarakat. Selain itu, kerjasama dalam bidang operasi penegakan hukum juga menjadi fokus penting. Indonesia dan Australia meningkatkan kolaborasi mereka dalam memerangi ancaman teroris,

---

<sup>55</sup> Erianto, "implikasi peningkatan hubungan kerjasama pertahanan indonesia – australia terhadap stabilitas laut china selatan tahun 2019 – 2021", (UIN Makassar, skripsi), hal 54-55

<sup>56</sup> *Ibid*

---

<sup>57</sup> Diakses dari, <https://www.voanews.com/a/australia-indonesia-military-ties/3740322.html>, pada tanggal 02 Mei 2023. pukul 09.00am

peredaran narkoba, dan kejahatan lintas batas. Pertukaran informasi intelijen, pelatihan personel, dan kerjasama operasional menjadi bagian penting dari kerjasama ini. Kedua negara saling mendukung dalam menjaga keamanan regional dan mencegah pergerakan kelompok ekstremis serta kejahatan transnasional.

Kerjasama militer juga terus berlanjut antara Indonesia dan Australia selama masa pandemi. Meskipun adanya pembatasan perjalanan dan pengurangan skala latihan, kedua negara masih melaksanakan latihan militer bersama, pertukaran personel, dan kerjasama dalam bidang pengembangan kapasitas pertahanan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan pertahanan kedua negara, serta memperkuat stabilitas regional.

Selain itu, Indonesia dan Australia juga saling memberikan dukungan dan bantuan dalam hal evakuasi warga negara mereka yang terdampak pandemi. Kedua negara bekerja sama dalam menyediakan transportasi dan logistik untuk memfasilitasi proses evakuasi yang aman dan efektif.

Selama pemerintahan Joko Widodo, kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang pertahanan dan keamanan mengalami perkembangan positif. Fokus utama ditujukan pada perdamaian, stabilitas, dan keamanan maritim. Melalui dialog dan kunjungan tingkat tinggi, kedua negara bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia pada masa COVID-19 menjadi kunci dalam mengatasi tantangan bersama dan memastikan keamanan regional. Melibatkan penanganan kesehatan, operasi penegakan hukum, kerjasama militer, dan dukungan evakuasi, kedua negara bekerja sama untuk

menjaga stabilitas regional dan keamanan masyarakat di Asia Tenggara. Untuk mempermudah dalam melihat kerjasama kedua negara antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia akan digambarkan pada tabel berikut ini:

Dari keterangan tabel diatas selama periode pemerintahan pertama presiden Joko Widodo ada 4 kali pertemuan 2+2 Meetings terjadi,yaitu:

1. Pada tanggal 10-11 November 2015 di Jakarta: Pertemuan "2+2" meetings ketiga diadakan di Jakarta, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Marise Payne untuk membahas cara meningkatkan kerja sama dalam isu-isu keamanan.
2. Pada tanggal 29-30 Agustus 2016 di Bali: Pertemuan "2+2" meetings keempat berlangsung di Bali, di mana Presiden Joko Widodo bergabung dengan menteri luar negeri dan pertahanan dari kedua negara untuk membahas perdagangan, investasi, serta stabilitas regional.
3. Pada tanggal 16 Maret 2018 di Sydney: Pertemuan "2+2" meetingskelima antara Indonesia dan Australia sebenarnya diadakan di Sydney, Australia. Pertemuan ini melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara untuk membahas berbagai isu bilateral dan regional, termasuk kerja sama pertahanan, upaya penanggulangan terorisme, dan keamanan maritim.
4. Pada tanggal 6 Desember 2019 di Bali: Selama pertemuan "2+2"

meetings keenam di Bali, Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dan Indonesia mengkonfirmasi komitmen mereka terhadap Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) dan membahas berbagai bidang kerja sama. Mereka menekankan pentingnya kerja sama maritim, mengungkapkan kekhawatiran tentang Laut China Selatan, dan menyoroti upaya bersama dalam penanggulangan terorisme dan promosi perdamaian. Para menteri juga mengakui nilai dari keterlibatan regional dan multilateral serta berharap untuk memperkuat hubungan bilateral lebih lanjut.

Kemudian diadakan 3 Kali Annual Leaders Meetings, yaitu:

1. Pada tanggal 22-24 November 2015 di Jakarta: Pertemuan Annual Leaders Meetings diadakan di Jakarta, di mana Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menandatangani deklarasi bersama tentang kerja sama maritim.
2. Pada tanggal 26-27 Februari 2017 di Sydney: Pertemuan Annual Leaders Meetings ini difokuskan pada kerja sama keamanan siber sambil juga membahas bidang lain seperti perdagangan dan investasi.
3. Pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2018 di Bogor: Pertemuan Annual Leaders Meetings Diadakan di Bogor di Kompleks Istana Kepresidenan, kedua pihak membahas cara untuk memperluas hubungan perdagangan bilateral di tengah ketidakpastian global.

Selanjutnya, 4 Kali Defence Ministers Meetings antara Indonesia dengan Australia, yaitu:

1. Pada tanggal 10-11 November 2015 di Jakarta: Pertemuan Menteri Pertahanan diadakan di Jakarta, di mana Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membahas cara untuk meningkatkan kerja sama dalam keamanan maritim dan langkah-langkah penanggulangan terorisme.
2. Pada tanggal 14-15 Juni 2017 di Sydney: Pertemuan ini difokuskan pada kerja sama keamanan siber antara Indonesia dan Australia sambil juga membahas bidang lain seperti latihan militer bersama.
3. Pada tanggal 17-18 Mei 2018 di Darwin: Pertemuan ini diadakan di Darwin, dan berpusat pada latihan militer bersama antara angkatan bersenjata kedua negara, serta pembahasan terkait dengan kekhawatiran keamanan regional.
4. Pada tanggal 22-23 Oktober 2019 di Canberra: Selama kunjungan pejabat pertahanan Indonesia ke Canberra, kedua belah pihak membahas peningkatan kemampuan respons bencana setelah bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami yang telah mempengaruhi kedua negara seiring waktu.

Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) Plus adalah platform untuk mempromosikan kerja sama antara kementerian pertahanan negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialog mereka, yang termasuk Australia. ADMM Plus melibatkan delapan mitra dialog: Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat.

Terjadi 3 kali hubungan Indonesia-Australia melalui ADMM Plus pada periode pertama:

1. Pada tanggal 3-4 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia : Pertemuan ADMM Plus yang ketiga berlangsung di Kuala Lumpur. Selama acara ini, delegasi Indonesia dan Australia terlibat dalam diskusi tentang tantangan keamanan regional serta cara untuk memperkuat kerja sama pertahanan multilateral di antara negara-negara peserta.
2. Pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Manila, Filipina: Pertemuan ADMM Plus yang keempat diadakan di Manila, di mana Indonesia dan Australia melanjutkan keterlibatan mereka dalam berbagai isu, seperti upaya penanggulangan terorisme atau operasi bantuan kemanusiaan/bantuan bencana bersama dengan bidang lain yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.
3. Pada tanggal 17-18 November 2019 di Bangkok, Thailand: Pada edisi kelima ADMM Plus yang diselenggarakan di Bangkok, kedua pihak aktif berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai ancaman keamanan yang muncul, termasuk perang siber atau insiden perompakan yang mempengaruhi jalur perdagangan maritim di seluruh Asia Tenggara.

Karena situasi pandemi COVID-19 yang dimulai awal tahun lalu hingga saat ini, tidak ada pertemuan fisik yang diadakan dalam kerangka sesi tahunan reguler seperti yang disebutkan di atas atau kelompok kerja khusus yang mencakup domain khusus. Pembatasan perjalanan membuat tidak mungkin bagi pejabat dari

berbagai negara yang terlibat di sini, termasuk Indonesia/Australia, serta anggota komunitas regional/global yang lebih luas yang menjadi bagian dari delegasi yang menghadiri acara-acara ini dari waktu ke waktu.

Pada periode pertama ini fokus politik dan keamanan di sub-regional Indo-Pasifik menjadi perhatian utama bagi Indonesia dan Australia. Salah satu bentuk kerjasama yang diperkuat dalam periode ini adalah patroli bersama di kawasan Indo Pasifik, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta menghadapi dinamika yang berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Patroli Terkoordinasi atau Coordination Patrol Maritime antara Australia dan Indonesia (AUSINDO CORPAT) yang pertama kali diadakan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, dimulai di benoa bali pada tanggal 27 mei, yang berpatroli dikawasan perairan indonesia dan australia dalam 10 hari dan akan berakhir di kota Darwin. Australia mengirimkan kapal patroli kelas Armidale, kapal HMA Bathurst, Glenelg, dan Pesawat AP-3C Orion. Sedangkan pihak Indonesia mengirimkan dua kapal angkatan laut KRI Hiu dan Pandrong, serta satu unit pesawat patrol maritim.<sup>58</sup>

Melalui kerjasama AUSINDO CORPAT, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk menjaga keamanan maritim dan memperkuat kerjasama dalam hal penegakan hukum, penanggulangan ancaman kelautan, dan pencegahan kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, narkoba, dan senjata ilegal di kawasan Indo Pasifik. Patroli bersama ini

---

<sup>58</sup> ,Diakses dari, <https://news.navy.gov.au/en/jun2017/Operations/3797Australia-and-Indonesia-unite-to-patrol-fisheries.html>, pada 30 Mei 2023 pukul 14.40

melibatkan angkatan laut dari kedua negara untuk melaksanakan operasi gabungan dan berbagi informasi demi mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan maritim.

Selain itu, kerjasama dalam latihan militer juga menjadi bagian penting dari hubungan pertahanan antara Indonesia dan Australia. Dalam beberapa event, seperti Cassowary Exercise, New Horizon Exercise, dan Kakadu exercise, kedua negara melaksanakan latihan militer Angkatan Laut secara bersama-sama. Latihan-latihan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan operasional antara kedua angkatan laut, serta memperkuat kesiapan dan respons dalam menghadapi situasi keamanan yang kompleks di kawasan Indo Pasifik.

Salah satu latihan terbaru antara Indonesia dan Australia adalah Latihan Kasuari. Latihan ini dilakukan oleh Angkatan Laut Australia dan Angkatan Bersenjata Indonesia di Indonesia. Tujuan utama latihan ini adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara kedua angkatan laut.<sup>59</sup> Mereka melibatkan berbagai kegiatan pelatihan seperti latihan persenjataan, operasi naik, dan perang antikapal selam. Selain itu, ada juga Latihan Garuda Shield<sup>60</sup> yang merupakan latihan militer yang diadakan antara Indonesia, Australia, dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Pasukan Pertahanan Australia bergabung dalam latihan ini untuk pertama kalinya. Fokus latihan ini adalah untuk memperkuat hubungan militer bilateral antara Indonesia

dan Australia serta meningkatkan kerjasama dalam operasi persenjataan gabungan. Latihan Kakadu juga menjadi latihan militer penting antara kedua negara.<sup>61</sup> Latihan ini diadakan dua tahun sekali dan melibatkan perang maritim, operasi amfibi, serta bantuan kemanusiaan dan bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapan dan kerjasama antara pasukan yang berpartisipasi, serta memperkuat kerja sama keamanan regional di antara Australia, Indonesia, dan negara-negara lain di kawasan ini.

Selain itu, Indonesia dan Australia juga telah berpartisipasi dalam acara pelatihan militer gabungan lainnya, seperti New Horizon Exercise, yang fokus pada pelatihan kontra-terorisme dan tanggap bencana. Semua latihan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan bekerja sama dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui latihan-latihan ini, Indonesia dan Australia terus memperkuat hubungan militer mereka dan meningkatkan kemampuan operasional serta kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama bilateral dalam menjaga stabilitas regional dan mempromosikan perdamaian di Indo-Pasifik.

Pada Periode Kedua pemerintahan Joko Widodo Indonesia dan Australia memperkuat hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan melalui berbagai pertemuan tingkat tinggi, termasuk 2+2 Meetings, Annuals Leaders Meetings, dan ASEAN Defence Ministers Meetings. Pada

---

<sup>59</sup> Diakses dari. <https://www.naval-technology.com/news/australia-indonesia-exercise-cassowary/>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 15.10

<sup>60</sup> Australian Embassy in Indonesia, diakses dari [https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR22\\_029.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR22_029.html), pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 15.30

---

<sup>61</sup> Australian Government Defence, diakses dari <https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2022-09-10/exercise-kakadu-begins-darwin>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 16.10

Periode ini ada 2 kali 2+2 Meetings terjadi,yaitu:

1. Pada tanggal 9 September 2021 di Jakarta: Pertemuan 2+2 Meetings ke tujuh antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dan Indonesia diadakan di Jakarta. Mereka mengkonfirmasi komitmen terhadap Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) dan membahas dampak krisis COVID-19 di kedua negara dan wilayah tersebut. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional, mendukung peran ASEAN, dan melawan disinformasi. Para menteri membahas kerja sama pertahanan bilateral, keamanan maritim, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan upaya penanggulangan terorisme. Mereka juga menyoroti perlunya kerja sama keamanan siber yang kuat dan kolaborasi dengan mitra regional lainnya dan forum multilateral. Pertemuan "2+2" berikutnya akan diadakan di Australia.
2. Pada tanggal 9 Februari 2023 di Canberra: Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dan Indonesia mengadakan Pertemuan 2+2 Meetings ke delapan di Canberra. Mereka mengkonfirmasi komitmen mereka terhadap kerja sama dalam Kerjasama Strategis Komprehensif, membahas tantangan regional, dan menyatakan dukungan mereka terhadap ASEAN dan arsitektur yang dipimpin oleh ASEAN. Mereka juga membahas isu-isu seperti keterlibatan pertahanan, krisis di Myanmar, Laut China Selatan, hubungan ekonomi, kebijakan siber, perubahan iklim,

dan penanggulangan terorisme. Para menteri Indonesia menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan keramahan yang diberikan.

Kemudian diadakan 3 Kali pertemuan Annual Leaders Meetings,yaitu:

1. Pada Bulan 10 Februari sampai Maret 2020 di Canberra: Selama kunjungan pejabat Indonesia ke Canberra,topik yang dibahas meliputi konektivitas antarorang melalui berbagai saluran seperti pendidikan atau pariwisata, tetapi juga isu-isu strategis yang lebih luas terkait stabilitas regional atau langkah-langkah perlindungan lingkungan, antara lain.
2. Pada Bulan Mei sampai November 2021 di Perth : Annual Leaders Meetings berlangsung selama beberapa bulan karena pembatasan perjalanan terkait COVID-19 yang sedang berlangsung, yang memengaruhi kunjungan dari kedua kepemimpinan negara. Pertemuan ini melibatkan diskusi terkait inisiatif pertumbuhan ekonomi dalam situasi yang tidak pasti serta masalah keamanan regional mengingat perubahan yang cepat terjadi di kawasan Indo-Pasifik.
3. Pada tanggal 5-7 Juni 2022 di Bogor: Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese bertemu untuk Pertemuan Pemimpin Tahunan Indonesia-Australia pada bulan Juni 2022. Mereka mengkonfirmasi komitmen mereka terhadap Kerjasama Strategis Komprehensif yang diluncurkan pada tahun 2018, dengan fokus pada kemitraan ekonomi, koneksi antar orang, kepentingan bersama, kerjasama maritim, dan stabilitas

Indo-Pasifik. Diskusi meliputi perubahan iklim, kerja sama ekonomi, dukungan infrastruktur, kerja sama kesehatan, pendidikan, dan keterlibatan regional. Kedua pemimpin menyatakan dukungan mereka terhadap ASEAN dan kepentingannya, serta menekankan pentingnya mengatasi tantangan di Myanmar dan Afghanistan. Pertemuan ini memperkuat ikatan persahabatan dan Kerjasama Strategis Komprehensif antara kedua negara.

Pertemuan 2+2, yang melibatkan menteri luar negeri dan pertahanan dari kedua negara, telah menjadi sarana penting dalam mempromosikan upaya bersama dalam mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan. Pada tahun 2021, kedua negara memperbarui Nota Kesepahaman tentang Kontra Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan dalam pertemuan 2+2 di Jakarta. Annual Leaders Meetings juga memiliki peran penting dalam memperkuat kerja sama pertahanan. Pada tahun 2021, Indonesia dan Australia membahas peluang kerja sama baru, termasuk dalam bidang keamanan maritim dan penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), Indonesia dan Australia bekerja sama untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional. Pada tahun 2019, mereka menjadi tuan rumah bersama Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Australia, di mana mereka membahas cara untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang kontra-terorisme, keamanan maritim, dan operasi pemeliharaan perdamaian.

Secara keseluruhan, perkembangan hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia ditandai dengan komitmen untuk

menjunjung tinggi hukum internasional dan bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pertemuan tingkat tinggi yang beragam telah memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tantangan keamanan bersama dan mengembangkan solusi bersama untuk menghadapinya.

Secara rinci, pada bidang intel di tahun 2021 dari 17 kerjasama di bidang intel, Australia menjalankan 2 kerjasama. Lalu dari 245 kerjasama di bidang operasi dan latihan, Australia menjalankan 32 kerjasama. Kemudian, dari 245 kerjasama di bidang personel dan pendidikan, Australia menjalankan 35 kerjasama. Selanjutnya dalam bidang logistik, dari 5 kerjasama dimana 2 diantaranya merupakan kerjasama bersama Australia. Dan terakhir, dalam bidang kunjungan dari 52 kerjasama, Australia menjalankan 12 kerjasama. Selain dalam hal kerjasama teknis dalam hal pertahanan, Indonesia juga mengadakan perencanaan dalam hal membeli Alat Utama Sistem Persenjataan Utama (Alutsista). Untuk pengadaan persenjataan, dalam beberapa rilis data, Indonesia tidak memilih Australia sebagai mitranya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, persaingan geopolitik dalam satu dekade terakhir semakin meningkat, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok dan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat saling bersaing untuk dominasi di kawasan ini, dengan ASEAN, negara-negara Mikro, dan persemakmuran barat turut terkena dampaknya. Tiongkok menunjukkan agresivitasnya melalui Konsep Nine Dash Line, Belt and Road Initiative ASEAN-China, dan ekspansi militernya di Laut China Selatan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi hubungan

diplomasi di wilayah tersebut. Australia, sebagai respons terhadap kebangkitan dan agresivitas Tiongkok, menerapkan kebijakan Keseimbangan Kekuatan. Australia juga mendorong negara-negara di kawasan untuk mematuhi kode etik yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, Indonesia menerapkan strategi *indirect balancing* melalui kerjasama pertahanan dengan Australia sebagai aktor eksternal. Namun, Indonesia juga tetap menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Hal ini merupakan upaya pengawasan terhadap Tiongkok yang bisa menjadi ancaman di masa depan. Selain itu, Indonesia juga menerapkan strategi *hedging* dalam konteks ekonomi. Indonesia terlibat dalam proyek-proyek strategis Tiongkok seperti *Belt and Road Initiative (BRI)* dan *Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, namun tetap berhati-hati dalam hubungan dengan Tiongkok. Kedua negara ini mendorong kerjasama yang lebih strategis, termasuk peningkatan anggaran belanja militer Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan. Terdapat wacana bahwa Indonesia dan Australia sebagai negara kekuatan menengah semakin mendekati satu sama lainnya. Indonesia meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Australia, sebagai langkah untuk menjaga kestabilan kawasan.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam hal pertahanan dan keamanan memiliki implikasi yang lebih luas. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan untuk semakin mendekatkan hubungan antara kedua negara sebagai negara kekuatan menengah di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia meningkatkan anggaran belanja alutsista militernya sebagai bagian dari kerjasama dengan Australia. Kedua negara berupaya menjaga kestabilan kawasan dengan menghadapi persaingan dan ketegangan

yang muncul akibat rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, Indonesia juga menjalankan kebijakan strategis lainnya, seperti menjaga keseimbangan dan menghindari terjebak dalam konflik besar antara kekuatan global. Indonesia menerapkan strategi *hedging* dalam kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kemandirian. Secara keseluruhan, strategi-strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik mencerminkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kestabilan, serta menjaga peran Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berperan dalam menciptakan alternatif dan visi kerjasama di kawasan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Bambang Cipto, *Strategi China Merebut Status Super Power*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar, 2018)
- Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories*. (New York : Happer and Row Publisher, 1997)
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, (Jakarta: Erlangga, 1993)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)

Waltz Kenneth, *Theory of International Politics*, (Addison-Wesley Pub. Co.1979).

Center for Science and International Affairs, 2017)

### *Skripsi*

Erianto, "implikasi peningkatan hubungan kerjasama pertahanan indonesia – australia terhadap stabilitas laut china selatan tahun 2019 – 2021", (UIN Makassar, skripsi)

Evan a Laksana, *Reinforcing Indonesia-Australia Defence Relation: the case of maritime calibration* (Sydney: Lowy Institute, 2018)

Marthin Manurung, *Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Dengan Jepang Tahun 2015-2020*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021)

Gabriele Abbondanza, *Whither the Indo-Pacific? Middle power strategies from Australia, South Korea and Indonesia*, *International Affairs*, Volume 98, Issue 2, March 2022..

### *Jurnal*

Aisha R. Kusumasomantri, *Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan*, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17, No. 1, 2015,

Hamka Hendra Noer. 2022. "Perang dan Keamanan dalam Tinjauan Teori Neo-Realisme dan Institusionalisme". *Jurnal Independen* Vol. 3 No. 1

Avery Goldstein, *Power Transition, Institutions, and China's Rise in East Asia: Theoretical Expectations and Evidence*, *Journal of Strategic Studies*, Vol. 30, No. 4-5, 2007.

J.David Singer, *World Politics*, vol 14, *The International System: Technical Essays*. (October, 1961).

Carr, A. (2013). *Is Australia a middle power? A systemic impact approach*. *Australian Journal of International Affairs*, 68(1),

Kuik Cheng-Chwee, *How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China*, *Journal of Contemporary China*, Vol. 25, No. 100

David M. Lampton, Selina Ho and Cheng-Chwee Kuik, *Rivers of iron: railroads and Chinese power in southeast Asia* (Berkeley: University of California Press, 2020).

Maksum, A, 2017, *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, (Jurnal Sospol, Vol 3 No.1

Eleanor Freund, *Freedom of Navigation in the South China Sea: A Practical Guide*, (Cambridge: Belfer

Mark Beeson, Alan Bloomfield and Wahyu Wicaksana, 'Unlikely allies? Australia, Indonesia and the strategic cultures of middle powers', *Asian Security* 17: 2, 2020.

M. Douch and B. Solomon, (2014), 'Middle Powers and the Demand for Military Expenditures', *Defence and Peace Economics*, Francis & Taylor. Vol. 24, No 6.

Muhammad Khusna Bayu Hardianto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*

- sebagai Negara Maritim, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Muhar Junef, Jurnal, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan", (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016).
- Puji Andrianto. 2018. "Pandangan Neo-Realisme Terhadap MERCOSUR Sebagai Institusi Perdagangan di Kawasan Amerika Selatan. eJournal Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNMUL Vol. 6 No. 2
- Prayoga, Adhit. dkk. 2021. Diplomasi Pertahanan Di Laut Cina Selatan: Solusi Strategis. Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 7.
- Richard A. Higgott and Kim R. Nossal, 'The international politics of liminality: relocating Australia in the Asia Pacific', Australian Journal of Political Science 32: 2, 1997.
- Shekhar, Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century.
- Soumyodeep Deb and Nathan Wilson, "The Coming of Quad and the Balance of Power in the Indo-Pacific", Journal of Indo-Pacific Affairs, Air University Press.
- Thesalonika Yulyanti R, strategy of indonesia maritime defense in the middle of asia pacific conflict potential (Jurnal Strategi Pertahanan Laut) Volume 8, Nomor 1, 2022.
- William Tow, 'Deputy sheriff or independent ally? Evolving Australian-American ties in an ambiguous world order', Pacific Review 17: 2, 2004.
- Laporan Resmi Pemerintah**
- Australian Department of Defence, 2020 defence strategic update, p. 15.
- Australian Embassy in Indonesia, diakses dari [https://indonesia.embassy.gov.au/jakarta/MR22\\_029.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jakarta/MR22_029.html)
- Australian Government, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation>, pada 1 mei 2023.
- Australian Government Defence, diakses dari <https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2022-09-10/exercise-kakadu-begins-darwin>, pada tanggal 30 Mei 2023
- Australian Government Department of Defence, Defence Annual Report 2020-2021, (Canberra: Australian Government, 2021), h. ii
- Australia Government :Department of Foreign Affairs and Trade, Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia
- ASEAN, ASEAN outlook on the Indo-Pacific (Bangkok, 2019).
- Department of Defense of the United States of America, "China Military Power Report 2020"
- European Parliament, Australia Strategic View of The Indo-pacific, hal 8

IMF, 2023, diakses dari <https://www.imf.org/en/Countries/AUS>.

Julia Gillard, 1st Indonesia-Australia Annual Leaders' Meeting - Joint Communique, (Australia Government :Department of Prime Minister and Cabinet

National Interest Analysis, Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia the Framework for Security Cooperation

Prime Minister of Australia, Joint leaders statement on AUKUS, Canberra, 2021, diakses dari <https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus>. Pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 22.00

United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, No. 143 "China Maritime Claim In South China Sea" December 5, 2014

### **Berita**

Ajeng Dinar, "China nuclear warhead stockpile to reach 1,500 by 2035 if it continues its build-up pace, US says", diakses dari <https://www.abc.net.au/news/2022-11-30/china-nuclear-warhead-stockpile-to-reach-1500-by-2035-pentagon/101714288>, pada tanggal 27 April 2023 pukul 09.30 am

Bhavan Jaipragas, South China Sea: Malaysia scrambles jets to intercept 16 Chinese military, diakses planes diakses dari <https://www.scmp.com/week->

asia/politics/article/3135661/pada tanggal 25 april pukul 20.30 pm

Bonnie S Glaser, "Conflict in the South China Sea", diakses dari <https://www.cfr.org/report/conflict-south-china-sea>, Rabu 22 Maret 2023, pukul 08.24 am

Carl Thayer, "USS Cowpens Incident Reveals Strategic Mistrust Between U.S. and China", diakses dari The Diplomat di <https://thediplomat.com/2013/12/uss-cowpens-incident-reveals-strategic-mistrust-between-u-s-and-china/> Senin, 20 Maret 2023, pukul 12:08 am.

Dewi Fortuna Anwar, Indonesia's Response to China's Rise, diakses dari Project for Peaceful Competition di <https://www.peacefulcompetition.org/pub/brdt54wm/release/1?readingCollection=0998716e> pada Jumat, 29 April 2023, pukul 02:02 pm

Esthi Maharani, "Soal Penyadapan, Istana: Australia Perlu Klarifikasi ke Indonesia", diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/18/mwg3hf-soal-penyadapan-istana-australia-perlu-klarifikasi-ke-indonesia?>, hari rabu 22 Maret pukul 10.45am

Global Fire Power, 2023, diakses dari [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=australia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=australia), pada tanggal 27 April 2023 pukul 21.30 pm

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/06/tiongkok-kuasai-ekspor-jalur-laut-cina-selatan>, diakses pada tanggal 25 april 2023 pukul 12.30

<https://news.navy.gov.au/en/jun2017/Operations/3797Australia-and-Indonesia-unite-to-patrol-fisheries.html>, pada 30 Mei 2023 pukul 14.40

<https://www.navaltechnology.com/news/australia-indonesia-exercise-cassowary/>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 15.10

<https://www.voanews.com/a/australia-indonesia-military-ties/3740322.html>, pada tanggal 02 Mei 2023, pukul 09.00am

Knoema, 2022, diakses dari <https://knoema.com/atlas/Australia/topics/National-Defense/Military-expenditure-and-trade/Military-expenditure>, pada tanggal 27 April 2023 pukul 19.30pm

Malcolm Cook. CNN Indonesia, Pengembangan Alutsista Jadi Investasi Pertahanan, diakses dari CNN Indonesia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210906040039-20-690057/pengembangan-alutsista-jadi-investasi-pertahanan> pada Senin, 29 April 2023, pukul 09:50 am

Marcus Schultz, The Defence of Australia Requires a New Force Posture Review, diakses dari ASPI: Australian Strategic Policy Institute di <https://www.aspistrategist.org.au/the-defence-of-australia-requires-a-new-force-posture-review/> pada Rabu, 30 Juni 2022, pukul 03:48

Rehia Sebayang, Investasi China di Tengah Pusaran Pilpres 2019, diakses dari CNBC Indonesia di [https://www.cnbcindonesia.com/news/20190416172307-4-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190416172307-4-67155/investasi-china-ditengah-pusaran-pilpres-2019)

[67155/investasi-china-ditengah-pusaran-pilpres-2019](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190416172307-4-67155/investasi-china-ditengah-pusaran-pilpres-2019) pada Selasa, 26 Juli 2022, pukul 05:22 pm

Tom Westbrook, "U.S. and Australia to share cost of Marines deployed in Darwin", diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-australia-usa-defence-idUSKCN126067>, rabu 22 Maret 2023, pukul 08.45am

White House, "US-Indo Pacific Strategy 2022".